VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jeparu-Way Sekampung/Bunut Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Komunikasi antara Panitia Pengadaan Tanah, SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung selaku pihak yang memerlukan tanah dan Warga Pemilik Lahan tetap terjaga dengan adanya pertemuan-pertemuan, namun pada tahun 2008 tahapan pengadaan tanah belum disosialisasikan dengan baik, kemudian disosialisasikan kembali pada saat pengadaan tanah lanjutan 2013;
2. Sumber daya manusia anggota implementator pengadaan tanah cukup baik dengan basis pendidikan rata-rata sarjana. Hanya terkendala pada banyaknya tugas rutin kantor anggota Panitia Pengadaan Tanah dan pengelolaan dana operasional yang kurang optimal serta sarana prasarana yang belum memadai karena hanya memanfaatkan fasilitas kantor yang ada;

3. Disposisi implementator pun cukup baik yaitu selalu berupaya melaksanakan tahapan pengadaan tanah sesuai peraturan yang berlaku dan selalu bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait apabila ada kendala, Penilaian ganti rugi diserahkan kepada lembaga yang berkompeten dan Dana ganti rugi diserahkan langsung kepada pemilik lahan dengan cara mentransfer ke Rekening Bank masing-masing. Namun, SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung selaku pihak yang memerlukan tanah melakukan pembayaran ganti rugi tahun 2008 tidak mengacu pada nilai ganti rugi dalam Daftar Nominatif 2008 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah;
4. *Standar operating procedur (SOP)* dan pembagian kewenangan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi variabel lingkungan kebijakan yakni adanya Surat Edaran Gubernur yang menyatakan bahwa tanah tidak diganti rugi sehingga nilai ganti rugi ditolak oleh pemilik lahan dan adanya mediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Panitia Pengadaan Tanah.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Panitia Pengadaan Tanah melakukan sosialisasi kepada warga pemilik lahan dalam setiap kegiatan pengadaan tanah melalui pertemuan-pertemuan langsung dengan pemilik lahan;
2. Kegiatan pengadaan tanah sebaiknya dilakukan oleh instansi yang khusus melakukan kegiatan pengadaan tanah dengan personil yang terlatih dalam pelaksanaan pengadaan tanah;
3. Agar Panitia Pengadaan Tanah dapat mengingatkan pihak yang memerlukan tanah apabila melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membuat *Standar operating procedur (SOP)* dan pembagian kewenangan khusus mengatur pengadaan tanah;
5. Pemerintah Provinsi Lampung sebaiknya mendukung setiap kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembuat kebijakan dapat melakukan perubahan isi kebijakan terutama mengenai implementator pengadaan tanah yang sebaiknya dilakukan oleh lembaga khusus yang tugasnya hanya melakukan kegiatan pengadaan tanah atau dapat dilakukan pihak ketiga.